

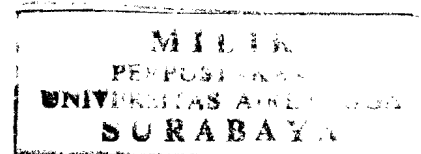
1. ANIMAL WELFARE LAW AND LEGISLATION  
2. ANIMALS - HABITATIONS

KIC  
Per 77/00  
Tam  
P

## **SKRIPSI**

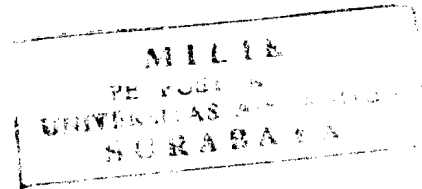
***TUGO PARSAORAN TAMBUNAN***

# **PENEGAKAN HUKUM DI TAMAN NASIONAL DALAM USAHA PERLINDUNGAN SATWA DAN HABITATNYA**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
S U R A B A Y A  
2000**

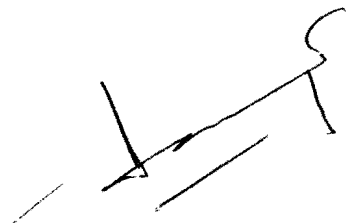
# **PENEGAKAN HUKUM DI TAMAN NASIONAL DALAM USAHA PERLINDUNGAN SATWA DAN HABITATNYA**



## **SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MENCAPAI  
GELAR SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**



**Lanny Ramli, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 131 878 383**

**Penyusun,**



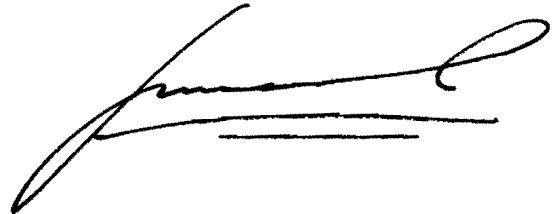
**Tugo P. Tambunan**  
**NIM. 039614384**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2000**

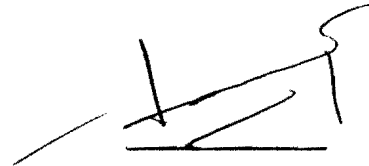
**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji  
Pada tanggal : 3 Agustus 2000**

**Tim Penguji Skripsi :**

**Ketua : Machsoen Ali, S.H., M.S.**



**Anggota : 1. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.**



**2. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.**



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN dan SARAN**

#### **1. Kesimpulan**

1. Perlindungan dan pelestarian satwa di kawasan Taman Nasional secara hukum diatur dalam beberapa peraturan perundang – undangan yang mencakup perlindungan terhadap kawasan konservasi sebagai habitat dari satwa dan perlindungan terhadap satwa itu sendiri. Perlindungan kawasan konservasi dan satwa secara hukum diatur antara lain dalam :

- a. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang membagi hutan berdasarkan fungsi pokoknya yaitu, hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Mengenai Taman Nasional yang termasuk dalam kawasan hutan konservasi maka pemanfaatan kawasan hutan hanya dapat dilakukan pada zona pemanfaatannya. Tentang zona pemanfaatan ini juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
- b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, juga membagi kawasan Taman Nasional dalam tiga zona utama yaitu zona inti, rimba dan pemanfaatan. Mengenai satwa diatur tentang larangan melakukan

perburuan, menangkap, melukai dan membunuh satwa yang dilindungi termasuk satwa dalam kawasan konservasi.

- c. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPH dan HPHH), dalam PP ini perlindungan utama diberikan kepada Taman Nasional, terdapat pada pasal 10 ayat 4 yang menyatakan bahwa terhadap kawasan hutan dengan peruntukan khusus (seperti taman nasional) tidak diberikan HPH dan atau HPHH. PP ini juga didukung oleh PP No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan dan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan No. 969 K/050/M.PE/1989 dan 429/KPTS – II/1989 tentang Pedoman Pengaturan Pelaksanaan Usaha Pertambangan dan Energi dalam Kawasan Hutan.
- d. Tentang kegiatan khusus yang dapat dilakukan didalam kawasan konservasi yang mendukung Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 adalah PP No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Larangan melakukan perburuan di kawasan konservasi diatur dalam PP tentang Perburuan Satwa Buru No. 18 Tahun 1994, yang memberi batasan – batasan tentang daerah yang boleh dilakukan perburuan.
- e. PP No. 7 Tahun 1999 tentang pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa memberi penjelasan terhadap upaya menjaga kelestarian satwa baik didalam maupun diluar habitatnya agar tidak punah.

- f. PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang mengatur penggunaan sumber daya alam baik tumbuhan maupun satwa liar dan atau bagian – bagiannya serta hasil daripadanya dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat – obatan dan pemeliharaan untuk kesenangan.
2. Selain perlindungan dan pelestarian satwa secara peraturan perundang – undangan, terdapat juga faktor – faktor yang mempengaruhi usaha pelestarian satwa yaitu antara lain :
- a. Peran hukum yang terbagi atas tiga aspek utama dalam hukum lingkungan yaitu aspek hukum lingkungan administrasi, keperdataan dan kepidanaan. Dalam peraturan perundang – undangan tentang lingkungan terutama pada perlindungan dan pelestarian satwa di taman nasional, ketiga aspek hukum lingkungan tersebut dapat ditemui terutama dalam penerapan sanksi. Terhadap pelanggaran peraturan perlindungan satwa dapat dikenakan sanksi administrasi dan atau pidana yang berlaku secara kumulatif baik eksternal (diterapkan secara bersama – sama) maupun secara internal (dua atau lebih sanksi administrasi diterapkan bersamaan).
  - b. Sarana pendukung perlindungan hukum terhadap satwa di taman nasional terdiri dari dua bagian utama yaitu lembaga pemerintah yang didukung oleh Lembaga Non Pemerintah (Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM) dan masyarakat itu sendiri. Kedua bagian tersebut saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan yaitu pemerintah sebagai pihak yang menerapkan dan

pengawas jalannya peraturan sebagai norma di masyarakat dan masyarakat sebagai pelaksana/pihak yang dikenakan peraturan serta LSM bersama masyarakat sebagai *control social* terhadap pemerintah dan peran serta seluruh pihak (pemerintah dan masyarakat)

## 2. Saran

- a. Peraturan perundang – undangan mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada saat ini telah banyak mengalami pembaharuan, dalam artian telah dikeluarkan undang – undang baru. Tentu peraturan tersebut harus didukung oleh lembaga pelaksananya di pemerintahan. Tetapi kesadaran untuk ikut memiliki alam dan menjaga kelestariannya lebih berguna daripada sekedar menjalankan tugas pelaksanaan dan kewenangan sesuai undang – undang. Kesadaran yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah untuk memberikan pengawasan dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan pada peraturan perlindungan konservasi alam. Karena disadari atau tidak, taman nasional sebagai tempat pengungsian terakhir satwa dan memperoleh status dilindungi tidaklah cukup hanya dengan undang – undang, sebab tidak akan dapat mengembalikan keberadaan satwa itu jika kemudian mereka punah.
- c. Satu hal yang paling penting dalam perlindungan satwa adalah peran serta masyarakat (yang didukung oleh pemerintah dan lembaga non pemerintah/LSM), sebagai *control social* terhadap tindakan aparat penegak hukum. Publikasi tentang konservasi satwa perlu terus

jenis binatang langka (dilindungi)  
baik yang dipelihara (masih hidup) maupun yang diawetkan, sebagai  
prestise dan hiasan rumah tangga.